

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan upaya yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pratama, Citra, (2019) kesejahteraan sosial adalah kondisi seseorang yang mampu melengkapi segala kebutuhan dan mampu melakukan relasi positif dengan lingkungan sekitar. Namun secara umum permasalahan yang dihadapi banyak negara terkait kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang disebabkan oleh kemiskinan (Adelia Suryani, 2023). Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling mendesak di seluruh dunia. Dalam konteks perekonomian, kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, yang dapat terlihat melalui beberapa aspek, seperti meningkatnya angka pengangguran karena individu yang hidup dalam kondisi miskin cenderung tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, banyaknya anak yang mengalami putus sekolah karena ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, memicu berbagai masalah kesehatan dan meningkatkan angka kematian karena tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan tidak

memiliki cukup asupan gizi yang baik, meningkatnya angka kriminalitas sebagai cara untuk bertahan hidup. Menurut Sinurat (2023) pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan, geografi, dan lingkungan merupakan aspek-aspek yang saling berhubungan dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan. Seperti, seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja. Sehingga pendapatan individu ini akan bergantung pada jenis pekerjaan yang dapat mereka akses.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang multidimensi, dimana kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia (Bray et al., 2019). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara (Y. Sari et al., 2020). Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan tingginya angka kemiskinan dapat berdampak negatif pada perekonomian suatu negara (Zhu et al., 2022), seperti menurunnya daya beli masyarakat. Rizky Amanda Yusnuri & Jariah Abubakar (2023) menyebutkan bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia akan mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan terhadap PDB.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau 9,36% (www.cnbcindonesia.com). Pada September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia berada di angka Rp 535.000 per kapita per bulan. Sementara jika di bandingkan September 2021, terjadi kenaikan 10,16%. Menurut Badan Pusat

Statistik (BPS), kenaikan garis kemiskinan ini di sebabkan efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tingginya angka pengakhiran hubungan kerja (PHK), dan tingginya harga bahan pokok pada saat itu. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mengklaim kenaikan garis kemiskinan pada september 2022 menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir (Hasmawati, 2023).

Menteri Sosial RI menyatakan bahwa sebanyak 52,45% penduduk miskin nasional berada di tiga provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jika bisa menurunkan kemiskinan di tiga provinsi ini termasuk Jawa Barat, maka kemiskinan nasional bisa diturunkan sebesar 50%. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menambahkan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, membuat angka absolut penduduk miskin menjadi tinggi (Kaban, 2025).

**Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi (Ribu Jiwa)**

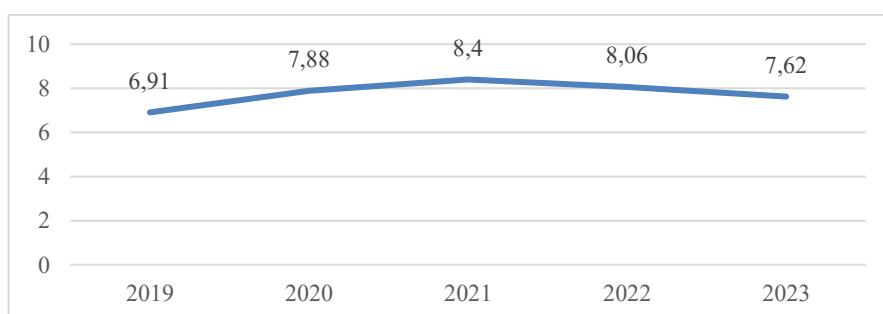
Tahun	Jawa Barat	Bali	DKI Jakarta	Jawa Tengah
2019	3.376	157	362	3.679
2020	3.920	165	481	3.981
2021	4.195	202	502	4.110
2022	4.017	206	502	3.831
2023	3.889	194	478	3.792

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di lima provinsi di Indonesia selama periode 2019-2023, dapat terlihat bahwa Jawa Barat secara konsisten mencatat angka yang tinggi. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 4.195 juta jiwa, menjadikannya salah satu yang tertinggi. Meskipun terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yakni menjadi 3.889 juta jiwa pada

tahun 2023, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Bali 194 ribu jiwa, dan DKI Jakarta 478 ribu jiwa. Bali dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan potensi ekonomi yang juga besar, terutama di sektor pariwisata dan jasa, namun berhasil menjaga angka kemiskinan tetap rendah. Sementara itu, Jawa Barat yang juga memiliki potensi serupa, justru menunjukkan jumlah penduduk miskin yang lebih besar. Bahkan dibandingkan Jawa Tengah yang memiliki tren menurun secara konsisten dari 2019 sebanyak 3.679 juta jiwa ke 2023 sebanyak 3.792 juta jiwa, Jawa Barat mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa belum stabilnya efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

Data BPS yang tersaji dalam bentuk grafik (Gambar 1.1) tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir menandakan adanya penurunan kemiskinan. Meskipun, angka kemiskinan ini cenderung turun namun masih belum menyamai angka kemiskinan sebelum covid-19. Pada tahun 2019 angka kemiskinan di Jawa Barat sebesar 6,91%. Sedangkan, angka kemiskinan tahun 2023 hanya menurun hingga sebesar 7,62%.



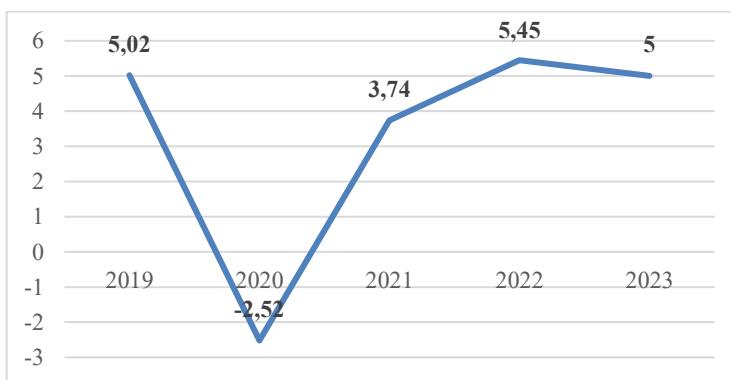
Sumber : Badan Pusat Statistik
Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2019-2023 (Persen)

Meskipun terdapat jumlah penurunan pada penduduk miskin, Jawa Barat masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Hal ini

dapat terlihat pada tabel 1 diatas, terkait jumlah penduduk miskin pada provinsi di Indonesia, Jawa Barat masih memiliki jumlah penduduk miskin tinggi diantara Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Sehingga hal ini menjadi urgensi dalam penelitian. Penting untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Menurut Nurkse (1961) dalam Hanifah & Hanifa (2021) menjelaskan teori "*The Vicious Cycle Of Poverty*" yang mana mengasumsikan bawah kemiskinan terjadi karena berhubungan dengan tingkat pemasukan per kapita. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kuznets Hypothesis) dalam Putra (2024) menyebutkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Salah satunya laju pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan perubahan struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan di sektor ekonomi, peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, yang pada gilirannya mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat (Ifa & Al Maidah, 2023). Pertumbuhan ekonomi juga dapat dijadikan sebagai sarana kemajuan dari tahun ke tahun dalam zona ekonomi suatu negara. Jika peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah dan kualitas faktor produksi, maka negara tersebut dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi di negaranya sendiri. Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan sebagai tolak ukur kinerja ekonomi suatu wilayah (L. T. A. Sari & Fisabilillah, 2021). Menurut Estrada & Wenagama (2020), laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah atau dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini merupakan cerminan potensi ekonomi suatu wilayah.

Nilai PDRB ini merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dan juga memperlihatkan struktur perekonomian regional. Pertumbuhan ekonomi ini diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lain, sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi masalah sosial ekonomi, terutama kemiskinan. Berikut ini tersaji data laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik
Gambar 1. 2
LPE di Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada awalnya pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5–6%, namun pada tahun 2020 sempat menurun tajam akibat krisis keuangan global dan dampak dari pandemi Covid-19, namun pada tahun-tahun berikutnya kembali pulih menjadi sekitar 3%. Seperti pada tahun 2021 perekonomian kembali bangkit dengan kuat dan stabil di kisaran 5% pada tahun 2023, yang menunjukkan pemulihan yang stabil dari krisis dan dari dampak pandemi Covid-19. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow Swan yang

dikembangkan oleh Robert Solow (1956) dan Trevor Swan (1956) secara terpisah, memberikan fondasi teoritis penting untuk menganalisis dinamika pertumbuhan jangka panjang. Teori ini menekankan pada akumulasi modal, teknologi, dan pertumbuhan populasi sebagai penentu utama output ekonomi.

Meskipun secara umum laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan pemulihan yang kuat setelah pandemi, permasalahan yang muncul adalah meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung positif, penurunan angka kemiskinan tidak berlangsung secara signifikan dan merata. Pertumbuhan ekonomi ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, sedangkan kelompok masyarakat bawah mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja formal yang layak. Hal ini terjadi karena ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin terasa, tercermin dari masih tingginya rasio gini Jawa Barat yang menunjukan bahwa ketimpangan ekonomi tetap menjadi masalah serius. Menurut data dari situs resmi statistik.jabarprov (2025) rasio gini Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 0.417, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 0.425, angka ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan

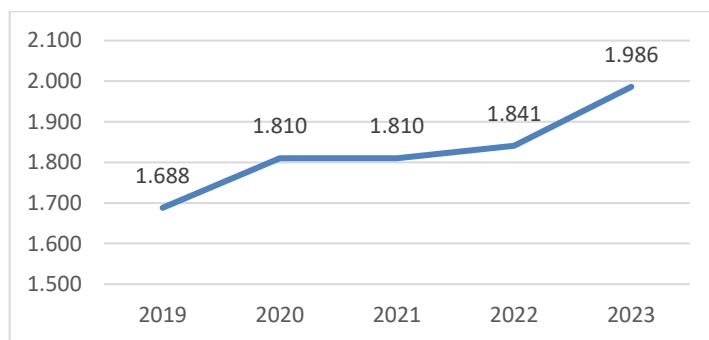
Namun ketika laju pertumbuhan ekonomi didorong agar menjadi lebih berkualitas, maka dapat diartikan sebagai peluang kerja meningkat, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk program pengentasan kemiskinan. Begitupun dalam teori Solow Swan memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan per

kapita, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan upah (Todaro, Michael P & Smith, 2015). Namun, efektivitas pertumbuhan dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada distribusi pendapatan. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat laju pengurangan kemiskinan, bahkan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang kuat (Ravallion, 2016). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan, termasuk kebijakan redistribusi pendapatan seperti pajak progresif, dan program transfer tunai.

Selain pertumbuhan ekonomi, upah minimum dapat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Syahputri & Fisabilillah, 2023). Upah minimum merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Upah minimum provinsi merupakan upah pokok bulanan, termasuk tunjangan tetap terendah di suatu provinsi (Kadek Agus Sudiarwan & Putu Ade Hariestha Martana, 2019). Upah minimum yang ideal dapat memenuhi pekerja, pemberi kerja, dan pencari kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah merupakan hak pekerja berupa uang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaannya. Upah minimum sebagai standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usaha atau pekerjaannya.

Fahrur Rozi, Yulmardi, (2018) menyatakan bahwa pengaruh antara upah minimum terhadap kemiskinan disebabkan oleh adanya biaya sosial inflasi dimana biaya sosial inflasi membuat seseorang menjadi semakin miskin. Biasanya upah

tidak bergantung pada seberapa banyak uang yang di cetak pemerintah. Jika pemerintah menurunkan inflasi dengan memperlambat pertumbuhan uang, maka para pekerja tidak akan melihat upah mereka naik cepat. Yang artinya bahwa meskipun inflasi dapat ditekan hal ini tidak selalu berimplikasi pada kenaikan upah yang lebih cepat bagi pekerja. Pengertian upah minimum provinsi muncul karena adanya perbedaan pemenuhan kebutuhan masing-masing provinsi. Kebijakan upah minimum pada dasarnya untuk melindungi pekerja dari tingkat upah yang rendah, terutama pada saat pasokan tenaga kerja sedang tinggi, sehingga tingkat upah tidak terus menurun (Jaya & Kholilah, 2020). Selain itu kebijakan upah minimum ini dibuat untuk melindungi pekerja terutama untuk mereka yang bekerja dari sektor informal dan berpenghasilan rendah dari eksplorasi upah yang tidak adil. Sehingga diharapkan pekerja mendapatkan upah yang layak sesuai dengan standar kebutuhan hidup, dengan kebijakan ini pun dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya daya beli masyarakat. Berikut ini tersaji UMP Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan BandungBergerak.id

Gambar 1.3

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.3, Upah Minimum Provinsi (UMP) dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019, upah minimum berada di angka Rp 1.668.373. Seiring waktu, nilai

upah minimum terus meningkat. Peningkatan signifikan mulai terlihat pada tahun 2020, ketika UMP mencapai lebih dari Rp 1.500.000. Tren kenaikan ini berlanjut secara bertahap hingga tahun 2023, di mana upah minimum hampir mencapai Rp 2.000.000. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan upah dengan kebutuhan hidup layak dan inflasi tahunan.

Meskipun upah minimum memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah, namun hal ini dapat menimbulkan efek samping seperti pengurangan lapangan kerja jika upah minimum yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga memerlukan kalibrasi yang cermat (David Neumark, n.d.) .Kenaikan UMP tidak beriringan dengan pengurangan kemiskinan, dimana saat terjadi kenaikan UMP sebesar 7,87% tingkat kemiskinan berkurang sebesar 5,46% pada tahun 2023. Selain itu, kenaikan UMP yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan lapangan kerja formal, yang artinya meskipun UMP meningkat, hal ini tidak membuat jumlah pekerjaan formal meningkat, karena jika UMP naik maka biaya tenaga kerja bagi pengusaha juga meningkat, beberapa pengusaha mungkin kesulitan untuk menyesuaikan dengan biaya yang lebih tinggi, dan berpotensi menaikkan harga barang dan jasa, dan tidak semua pekerja menerima UMP karena sebagian penduduk miskin bekerja di sektor informal, seperti buruh lepas, pedagang kecil, dan pekerja rumah tangga, yang tidak terlindungi oleh ketentuan upah minimum.

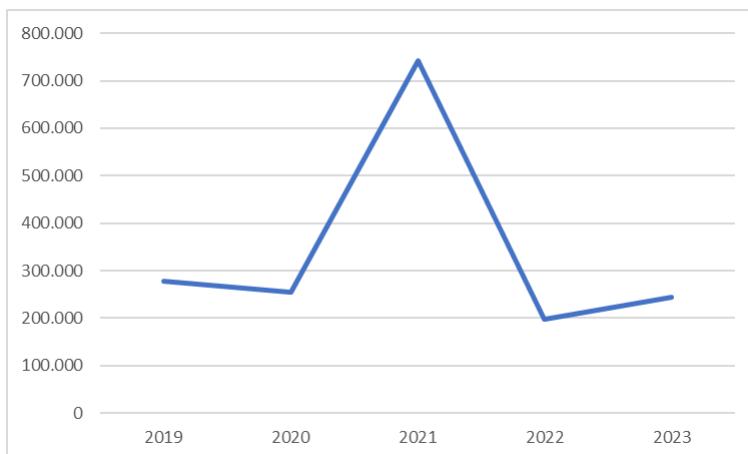
Namun meskipun begitu, selain dengan adanya peningkatan upah minimum, pemerintah juga membuat program bantuan agar dapat membantu masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi angka kemiskinan, seperti program bantuan sosial yang sudah berjalan sejak tahun 2005. Bantuan sosial merupakan dana transfer berupa uang atau barang dan jasa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bantuan ini tidak diberikan secara terus menerus pada setiap tahun anggaran dan diberikan secara selektif (R. Z. Putri & Effendi, 2021). Dana bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau diberikan kepada lembaga sosial. Ciri dari program ini adalah manfaat yang didapat dalam program ini sifatnya dapat langsung dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk barang dan jasa.

Menurut Banerjee (2015) belanja bantuan sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan asalkan dirancang dengan targeting yang efektif. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan untuk memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial agar tercapai tujuan pembangunan nasional (Santika et al., 2019). Selain itu, pemberian tunjangan serta subsidi pangan bagi daerah-daerah pinggiran dan miskin merupakan kebijakan pemerintah yang secara langsung ditunjukkan untuk menjaga harga agar bahan makanan pokok tetap rendah (Dyah Puspitaning Ayu, 2021).

Bentuk belanja bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial konsumtif, bantuan sosial produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu (Magdalena & Suhatman, 2020). Belanja bantuan

sosial konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer layanan (Irawan et al., 2024). Berikut ini tersaji data Belanja Bantuan Sosial di Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Jawa Barat Dalam Angka

Gambar 1. 4
Belanja Bantuan Sosial di Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.4 yang menunjukkan tren belanja bantuan sosial di Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023, dimana pengeluaran pada tahun 2019 berada di angka Rp. 277.421.000,00 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 253.750.000,00, dengan puncak belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 742.282.400,00. Kenaikan tajam pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan sebagai respons, pemerintah pusat dan daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan sosial guna membantu masyarakat

yang terdampak. Setelah itu belanja mengalami fluktuasi Rp. 196.885.510,00 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 Rp. 243.722.617,00.

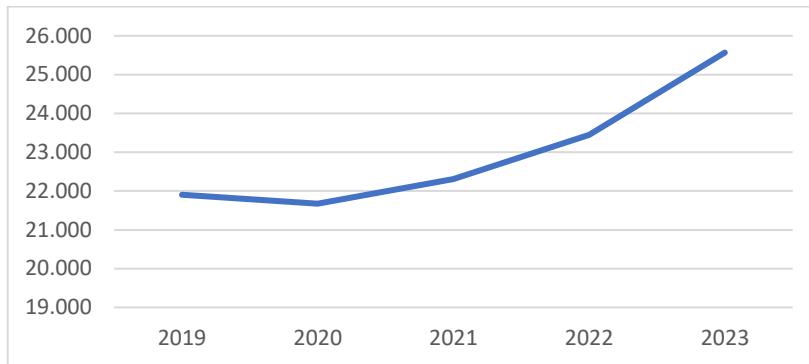
Belanja bantuan sosial digunakan sebagai indikator penurunan kemiskinan karena memiliki peran langsung dalam mendukung kelompok masyarakat rentan. Menurut Purwaningtyas, n.d., pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, ketidakjelasan waktu penyaluran, belum terintegrasinya data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penggunaan data yang sudah tidak mutakhir yang menyebabkan munculnya data ganda dan ketidaktepatan sasaran. Selain itu, jadwal penyaluran yang tidak seragam dan kurangnya keterbukaan informasi terkait bantuan sosial juga dapat menjadi hambatan.

Menurut Pierre Feric Engko, Muhammad Bugis, M. K. Tupamahu, (2024) dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, pemerintah perlu terus mengupayakan program/kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang dijabarkan didalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang mana didalam postur APBD itu sendiri tertuang didalam belanja subsidi, belanja bantuan keuangan, dan belanja bantuan sosial. Pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayar kepada pemerintah daerah oleh masyarakat wajib pajak, lalu dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk sarana prasarana seperti jalan, taman kota, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, dimana seluruh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan maupun kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja bantuan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

miskin, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga (Nurul Dienia Alfath, Puti Andiny, Yani Rizal, 2025).

Adanya belanja bantuan sosial tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, karena dengan belanja bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan yang lebih tinggi ini dapat menciptakan peluang kerja baru, baik di sektor formal maupun informal. Menurut Fields (2005) penyerapan tenaga kerja yang tinggi, terutama di sektor-sektor produktif merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah jabatan yang telah diisi sejauh jumlah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan secara komprehensif sebagai kumpulan individu dan pekerja dalam bidang usaha atau unit khusus (Nurlayli & Jumarni, 2022). Pekerjaan yang tersedia tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga dapat membuka akses bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi individu kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal. Ketika lebih banyak orang yang mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka dapat meningkatkan pendapatan, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Berikut ini tersaji data penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Keadaan Angkatan Kerja

**Gambar 1.5
Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Ribu Jiwa)**

Berdasarkan gambar 1.5 Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 mencapai 21.902.958 ribu jiwa namun sempat menurut pada tahun 2020 menjadi 21.674.854 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, penyerapan tenaga kerja kembali meningkat menjadi 22.311.685 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga 23.450.001 ribu jiwa pada tahun 2022 dan 25.569.900 ribu jiwa pada tahun 2023. Penyerapan tenaga kerja seringkali berhubungan dengan tingkat kemiskinan karena semakin banyaknya individu yang mendapatkan pekerjaan berarti semakin banyak pula orang yang dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Namun meskipun terjadi peningkatan persentase pada variabel penyerapan tenaga kerja dan penurunan persentase tingkat kemiskinan, tingkat kenaikan dan penurunannya tidak selaras. Seperti pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,94 %, tingkat kemiskinan naik sebesar 6.60%, lalu pada tahun 2021-2022 penyerapan tenaga kerja meningkat 5,11%, tingkat kemiskinan menurun 4.05%, dan pada tahun 2022-2023 penyerapan tenaga kerja meningkat 9.03% sedangkan tingkat kemiskinan hanya menurun sebesar 5.46%.

meskipun penyerapan tenaga kerja terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun penurunan angka kemiskinan tidak berjalan seiring secara proporsional.

Menurut Zamrowi (2007) jumlah penduduk yang bekerja mencerminkan jumlah lowongan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Keadaan ini biasa disebut dengan penyerapan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk bekerja adalah mereka yang sudah berusia 15 tahun ke atas, dan sudah memenuhi syarat untuk bekerja. Menurut (Ika Murni Wati, Anisa Fitria Utami, 2024) terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja di provinsi jawa barat yang dapat mengakibatkan angka pengangguran dan angka kemiskinan semakin meningkat. Jika terdapat banyak kesempatan kerja yang tersedia maka akan semakin tinggi juga angka penyerapan tenaga kerja, artinya akan semakin banyak penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan dan akan semakin banyak pula orang yang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga akan terlepas dari kondisi kekurangan ataupun kemiskinan (Yustitia et al., 2022), yang artinya hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut peneliti menemukan gap atau masalah dalam setiap masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji faktor penyebab kemiskinan dengan menggunakan variabel laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi , belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja terhadap

kemiskinan. Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2023 sebagai kebaruan dalam penelitian. Sehingga penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Bantuan Sosial, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2023**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat secara parsial dari tahun 2000-2023 ?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat secara simultan dari tahun 2000-2023 ?
3. Bagaimana elastisitas tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja terhadap

tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat secara parsial dari tahun 2000-2023

2. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat secara simultan dari tahun 2000-2023
3. Untuk mengetahui elastisitas tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, belanja bantuan sosial, dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2023. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam kebutuhan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk mempertimbangkan dalam merumuskan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif khususnya di Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal-jurnal dan buku-buku yang didapatkan dari internet dan perpustakaan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak Desember 2024 dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan. Adapun rencana kegiatan penelitian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian